**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**



**RENCANA KERJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**KABUPATEN REMBANG**

**Jalan Rembang–Pamotan Km.5 Telp.(0295) 693419**

**KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama ALLAH SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang tahun 2021 dapat terselesaikan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kerja ketentraman dan keamanan dalam priode tahunan. Selain itu Renja ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 1 (satu) Tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yakni dengan visi Bupati terpilih adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumberdaya Manusia, yang Dilandasi semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyaraat dan Kewirausahaan”.***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Rembang, Januari 2020KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAD:\2018\PRIBADI DATA\nota\ttd1.jpgKABUPATEN REMBANG**Drs. H. WALUYO, MM**Pembina Utama mudaNIP.19630401 199102 1 001 |

|  |
| --- |
| **DAFTAR ISI** |
|  |
|  |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
|  |  |  |  |
| BAB I  | : | PENDAHULUAN  | 1 |
|  |  | 1. Latar Belakang
 | 1 |
|  |  | 1. Landasan Hukum
 | 2 |
|  |  | 1. Maksud dan Tujuan
 | 3 |
|  |  | 1. Sistimatika Penulisan
 | 4 |
|  |  |  |  |
| BAB II  | : | HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP KAB. REMBANG TAHUN LALU. | 6 |
|  |  | 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Kab. Rembang Tahun 2019 dan Capaian Renstra Satpol PP Kab. Rembang 2016-2021
 | 6 |
|  |  | 1. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kab. Rembang
 | 23 |
|  |  | 1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP Kab. Rembang
 | 26 |
|  |  | 1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 | 39 |
|  |  |  |  |
| BAB III  | : | TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KAB. REMBANG  | 32 |
|  |  | 1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 | 32 |
|  |  | 1. Penentuan Isu-isu Strategis
 | 36 |
|  |  | 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Rembang
 | 37 |
|  |  |  |  |
| BAB IV  | : | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP KAB. REMBANG TAHUN 2020  | 41 |
|  |  |  |  |
| BAB V | : | PENUTUP | 47 |
|  |  |  |  |

**TABEL-TABEL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| TABEL | : | 2.1 | 8 |
| TABEL | : | 2.2 | 20 |
| TABEL | : | 2.3 | 22 |
| TABEL | : | 2.4 | 24 |
| TABEL | : | 2.5 | 25 |
| TABEL | : | 2.6 | 30 |
|  |  |  |  |
| TABEL | : | 3.1 | 39 |
|  |  |  |  |
| TABEL | : | 4.1 | 42 |
|  |  |  |  |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, untuk kemudian dituangkan kedalam Renstra PD tahun 2016 – 2021. Dalam pelaksanaannya, Renstra PD harus dijabarkan kembali kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renja PD disusun setiap tahun dengan tetap berpedoman pada Renstra PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kelima dari Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra-PD ) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021. Renja-PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021, akan memuat isu strategis, kondisi pencapaian hingga akhir tahun 2021, pemasalahan dan tantangan berkaitan dengan sarana dan prasarana permukiman, infrastruktur permukiman perdesaan dan kawasan kumuh serta penataan kota dan lingkungan kota.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja-SKPD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renja-PD merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

1. **Landasan Hukum**

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang Tahun 2021 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;
15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
16. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Satpol PP adalah sebagai Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Rembang.

1. Sebagai bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021;
2. Sebagai acuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
3. Merumuskan program dan kegiatan Satpol PP Kabupaten Rembang selama tahun 2021 yang mengarah pada pencapaian indikator sasaran dan program yang telah ditetapkan.

Sedangkan Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD Satpol PP adalah untuk :

1. Menjabarkan tentang kondisi daerah sekarang sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Rembang.
2. Memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam rentang waktu 1 ( satu ) tahunan.
4. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2021,

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU**

Bab ini berisi evaluasi dan analisis pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 – 2021. Program / kegiatan yang memenuhi ataupun yang tidak memenuhi target kinerja akan dikupas lebih dalam dalam bab ini berikut faktor penyebabnya serta implikasi terhadap target capaian program Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN REMBANG**

Bab ini berisi telaahan mengenai tujuan dan sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab Rembang mengacu pada renstra dan RPJMD Kab Rembang Tahun 2016-2021.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi uraian tentang rencana kerja dan pendanaan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**

# **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU**

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembangunan daerah adalah berupa penyediaan sarana dan prasarana dasar yang diarahkan untuk memenuhi, mendukung, dan mengarahkan pembangunan wilayah / kawasan permukiman baik dikawasan perkotaan maupun diperdesaan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat mendorong adanya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur permukiman pedesaan dan kawasan kumuh yaitu berkaitan dengan air bersih dan sanitasi, serta penyediaan kualitas lingkungan kota indah dan hijau melalui penyediaan taman perkotaan.

Untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam melaksanakan pembangunan seperti disebut diatas, diperlukan evaluasi yang fungsinya adalah mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan di tahun sebelumnya. Berikut akan diurakan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun sebelumnya.

## Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra 2016-2021

Sebagai instansi teknis, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang di dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk dapat menyusun suatu program dan rencana pembangunan yang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat seperti yang tertulis dalam tujuan RPJMD Kabupaten Rembang.

Dalam mewujudkan perencanaan yang baik maka dilakukan kegiatan evaluasi perencanaan yang merupakan salah satu fungsi dasar dari manajemen yang bertujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efesiensi dan efektifitas pencapaian sasaran suatu kegiatan. Evaluasi perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum semua masalah yang timbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.

Secara rinci, evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tahun lalu digambarkan sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1.**

**Pencapaian Kinerja SATPOL PP Tahun 2019**

**Kabupaten Rembang**

| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019** | **Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Renstra Lama** | **Renstra Baru** | **Renstra Lama** | **Renstra Baru** | **Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8 = (7/6)** | **9** | **10=(5+7+9)** | **11** |
| **1** |  |  |  |  | **Urusan Wajib** |
| **1** | **05** |  |  |  | **Bidang Perumahan** |
| **1** | **05** | **01** |  |  | **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** |
| **1** | **05** | **01** | **01** |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Makanan dan Minuman |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan perlengkapan kantor  |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pengadaan peralatan kantor  |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pengadaan alat-alat komunikasi |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan kantor  |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor  |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penataan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan/Dinas |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan peralatan kantor |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pengadaan alat-alat komunikasi |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penataan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan/Dinas |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Bimbingan Pelatihan Pengamanan |  |  |  | 100 | 12 Bln | 1 Paket | 1 Paket | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan forum Organisasi Perangkat Daerah |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Renja ,Renstra |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen-Dokumen Anggaran |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pengiriman anggota Hansip/Linmas ke Diklat ketrampilan di Provinsi |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pembinaan anggota Hansip/Linmas |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pengerahan Anggota Linmas Inti dalam rangka Hari Ulang Tahun Linmas |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Patroli Kamtibmas |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pengamanan kunjungan tamu |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Tes kesamaptaan anggota Satpol Pamong Praja |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pengamanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Kodal Trantib |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Peningkatan dan Pemberdayaan Linmas Inti |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pengembangan Kawasan Siaga Trantib (KST) |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Penyuluhan pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat pengamanan masyarakat terkait |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **Program Penegakan Peraturan Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Operasi Penegakan Perda  |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Operasi Penegakan disiplin PNS dan Siswa  |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar  |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi penyelenggaraan pengamanan  |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Penertiban atribut Parpol dan alat peraga lainnya  |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | **Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran |  |  |  | 100 | 12 Bln | 12 Bln | 12 Bln | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  | **Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sakip ( formulasi : Jumlah capaian Indikator Kinerja/Jumlah target Indikator Kinerja)** | **65** | - | - | - | - | **65** | **90** | **100** |
|  |  |  |  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | Jumlah Indikator Kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan  |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  | **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah** |  | **Prosentase ketercapaian pelayanan umum** |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum |  | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur |  | Persentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan |  | Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  | **Program peningkatan keterbukaan informasi publik** |  | **Persentase Informasi yang disampaikan ke publik (jumlah informasi yang disampaikan publik : jumlah informasi publik yg wajib disampaikan)** |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  | Pengelolaan keterbukaan informasi publik |  | Jumlah informasi yang disampaikan ke publik |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  | **Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas** |  | **Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Jumlah pelanggar Prokumda yang ditangani/ Jumlah pelanggaran Prokumda yang ada ) x 100 %** |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Persentase Kecamatan yang kondusif ( Jumlah Kecamatan yang kondusif / jumlah Kecamatan di Kab. Rembang x 100% )** |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  | Penegakan Produk Hukum Daerah;  |  | Jumlah operasi Gakda di wilayah Kabupaten Rembang,  |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  | Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat |  | Jumlah Kelompok Sasaran Tibum yang terbina |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  | **Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat**  |  | **Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk (jumlah linmas x 10.000) / jumlah penduduk** |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **prosentase layanan pemadaman, penylamatan, dan evakuasi korban dan berdampak kebakaran di kab. Rembang dalam tinggkat waktu tanggap (response tyme 15 menit / jmlh kejadian kebakaran di kab. Rembang x 100%)** |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  | Perlindungan Masyarakat |  | Jumlah Linmas Terlatih |  | - | - | - | - |  |  | **100** |
|  |  |  |  |  |  | Penanggulangan Bahaya Kebakaran |  | Presentase Kebakaran yang tertangani |  | - | - | - | - |  |  | **100** |

**Tabel 2.2**

**Penyerapan Anggaran Satpol PP Kabupaten Rembang**

**Tahun 2018-2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Anggaran Tahun** | **Realisasi Tahun** |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **A** |  **BELANJA TIDAK LANGSUNG**  | **6.147.762.000** | **6.472.649.393** | **5.936.219.414** | **6.240.104.640** |
| **B** |  **BELANJA LANGSUNG**  | **4.701.326.000** | **5.583.456.000** | **4.568.060.538** | **5.162.215.045** |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.695.000 | 2.000.000 | 455.000 | 1.975.000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 67.000.000 | 76.400.000 | 58.138.383 | 68.143.498 |
| 3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  | 155.000.000 | 188.500.000 | 154.000.000 | 181.600.000 |
| 4 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  | 17.000.000 | 14.000.000 | 13.650.000 | 14.000.000 |
| 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor  | 18.000.000 | 22.500.000 | 18.000.000 | 22.500.000 |
| 6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | 13.550.000 | 15.000.000 | 13.544.900 | 14.846.200 |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 24.500.000 | 12.000.000 | 24.427.000 | 12.000.000 |
| 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 27.305.000 | 27.000.000 | 24.695.000 | 24.934.000 |
| 9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 18.000.000 | 20.000.000 | 17.998.000 | 19.998.750 |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.996.000 | 3.996.000 |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman  | 36.000.000 | 35.000.000 | 36.000.000 | 34.999.500 |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah  | 101.000.000 | 121.600.000 | 98.709.600 | 121.347.500 |
| 13 | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan  | 272.604.000 | 375.000.000 | 270.854.000 | 368.425.000 |
| 14 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah  | 20.000.000 | 28.000.000 | 19.866.000 | 27.995.000 |
| 15 | Pengadaan perlengkapan kantor  | 129.235.000 | 0 | 126.211.000 | 0 |
| 16 | Pengadaan peralatan kantor  | 29.650.000 | 112.000.000 | 29.645.900 | 107.812.205 |
| 17 | Pengadaan alat-alat komunikasi | 0 | 102.400.000 | 0 | 96.897.000 |
| 18 | Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan kantor  | 462.487.000 | 0 | 444.676.000 | 0 |
| 19 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  | 205.000.000 | 250.000.000 | 200.930.000 | 244.806.900 |
| 20 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  | 40.000.000 | 75.000.000 | 37.921.505 | 71.588.365 |
| 21 |  Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor  | 6.400.000 | 9.000.000 | 6.380.000 | 8.997.800 |
| 22 | Penataan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan/Dinas | 0 | 200.000.000 | 0 | 192.664.900 |
| 23 |  Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan  | 72.000.000 | 1.500.000 | 71.640.000 | 1.500.000 |
| 24 | Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia  | 20.000.000 | 75.000.000 | 15.388.000 | 66.033.500 |
| 25 | Bimbingan Pelatihan Pengamanan | 0 | 16.000.000 | 0 | 15.815.650 |
| 26 | Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Pasukan Tingkat Provinsi dan Jambore Trantibum  | 100.000.000 | 121.500.000 | 98.127.000 | 108.409.000 |
| 27 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  | 9.000.000 | 10.000.000 | 8.760.000 | 7.325.000 |
| 28 | Penyelenggaraan forum Organisasi Perangkat Daerah | 0 | 10.000.000 | 0 | 9.209.000 |
| 29 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  | 9.000.000 | 22.000.000 | 6.600.000 | 18.720.000 |
| 30 | Penyusunan Renja ,Renstra  | 18.700.000 | 10.000.000 | 18.100.000 | 9.900.000 |
| 31 | Penyusunan Dokumen-Dokumen Anggaran  | 9.000.000 | 10.000.000 | 7.940.000 | 8.445.000 |
| 32 | Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)  | 9.000.000 | 10.000.000 | 8.400.000 | 8.870.000 |
| 33 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang | 0 | 10.000.000 | 0 | 9.960.650 |
| 34 | Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat pengamanan masyarakat terkait  | 41.200.000 | 70.000.000 | 41.165.000 | 65.912.660 |
| 35 | Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Daerah  | 225.000.000 | 0 | 221.938.500 | 0 |
| 36 | Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal  | 200.000.000 | 600.000.000 | 196.813.400 | 543.633.500 |
| 37 |  Pengiriman anggota Hansip/Linmas ke Diklat ketrampilan di Provinsi  | 36.000.000 | 75.000.000 | 34.744.790 | 74.256.579 |
| 38 |  Pembinaan anggota Hansip/Linmas  | 185.000.000 | 100.000.000 | 180.886.900 | 93.790.000 |
| 39 |  Pengerahan Anggota Linmas Inti dalam rangka Hari Ulang Tahun Linmas  | 18.000.000 | 30.000.000 | 17.730.000 | 29.896.000 |
| 40 |  Patroli Kamtibmas  | 120.000.000 | 153.656.000 | 107.091.000 | 93.525.500 |
| **No** | **Kegiatan** | **Anggaran Tahun** | **Realisasi Tahun** |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 41 |  Pengamanan kunjungan tamu  | 50.000.000 | 80.000.000 | 49.972.000 | 78.175.500 |
| 42 | Penyuluhan / Sosialisasi Pedagang Kaki Lima  | 0 |   | 0 | 0 |
| 43 | Tes kesamaptaan anggota Satpol Pamong Praja | 0 | 50.000.000 | 0 | 48.560.000 |
| 44 | Pengamanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif | 0 | 550.000.000 | 0 | 543.905.840 |
| 45 |  Kodal Trantib  | 50.000.000 | 150.000.000 | 47.862.500 | 62.657.000 |
| 46 |  Pembinaan Anggota Linmas Inti Kecamatan  | 75.000.000 | 0 | 71.829.000 | 0 |
| 47 |  Pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah  | 284.500.000 | 0 | 276.479.160 | 0 |
| 48 |  Peningkatan dan Pemberdayaan Linmas Inti  | 124.000.000 | 200.000.000 | 121.732.500 | 198.464.750 |
| 49 |  Fasilitasi Pengembangan Kawasan Siaga Trantib (KST)  | 24.500.000 | 30.000.000 | 23.093.000 | 24.286.000 |
| 50 | Fasilitasi Pemantauan dan Pengendalian Wilayah  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Penyuluhan pencegahan berkembangnya penyakit masyarakat  | 0 | 30.000.000 | 0 | 25.636.000 |
| 52 | Operasi Penegakan Perda  | 102.000.000 | 176.000.000 | 95.242.500 | 147.267.000 |
| 53 | Operasi Penegakan disiplin PNS dan Siswa  | 66.500.000 | 0 | 64.363.000 | 0 |
| 54 | Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar  | 45.000.000 | 70.000.000 | 44.933.000 | 46.088.750 |
| 55 | Fasilitasi penyelenggaraan pengamanan  | 385.000.000 | 444.000.000 | 365.600.000 | 431.895.250 |
| 56 | Penertiban atribut Parpol dan alat peraga lainnya  | 0 | 30.000.000 | 0 | 5.776.600 |
| 57 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran  | 131.940.000 | 116.434.100 | 129.482.650 | 112.745.965 |
| 58 | Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran  | 642.560.000 | 642.965.900 | 642.048.350 | 632.026.733 |
|  |  **JUMLAH**  | **4.701.326.000** | **5.583.456.000** | **4.568.060.538** | **5.162.215.045** |
|  |  **Presentase**  |  |  | **97,17** | **92,46** |

Sumber : Satpol PP Kab. Rembang

**Tabel 2.3**

**Pagu Anggaran Satpol PP Kabupaten Rembang**

**Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **PAGU INDUK** | **PAGU setelah PERKADA** | **PAGU setelah PERUBAHAN** |
| ***Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah*** | **1.768.989.800**  | **1.240.205.956**  |  **1.218.205.956**  |
| *Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum* | *345.489.800* | *202.292.248* |  218.117.248  |
| *Peningkatan sarana dan prasarana aparatur* | *388.500.000* | *264.935.000* |  299.110.000  |
| *Peningkatan kualitas sumber daya aparatur* | *776.000.000* | *522.972.000* |  450.972.000  |
| *Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan* | *259.000.000* | *250.006.708* |  250.006.708  |
| **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  **52.500.000**  |  **58.150.000**  |  **58.150.000**  |
| *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | *28.000.000* | *24.400.000* |  24.400.000  |
| *Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah* | *24.500.000* | *33.750.000* |  33.750.000  |
| **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik** |  **8.500.000**  |  **6.000.000**  |  **6.000.000**  |
| *Pengelolaan keterbukaan informasi publik* | *8.500.000* | *6.000.000* |  6.000.000  |
| **Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas** | **1.348.231.000**  | **1.241.902.197**  |  **1.321.902.197**  |
| *Penegakan Produk Hukum Daerah* | *437.033.000* | *471.052.437* |  551.052.437  |
| *Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat* | *911.198.000* | *770.849.760* |  770.849.760  |
| **Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat** | **2.647.938.000**  |  **958.459.703**  |  **1.008.459.703**  |
| *Perlindungan Masyarakat* | *442.000.000* | *449.899.800* |  449.899.800  |
| *Penanggulangan Bahaya Kebakaran* | *2.205.938.000* | *508.559.903* |  558.559.903  |
| **TOTAL** | **5.826.158.800**  | **3.504.717.856**  |  **3.612.717.856**  |

Dilihat dari tabel diatas kegiatan, anggaran Satpol PP Kabupaten Rembang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat dari Pemerintah Daerah. Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan realisasi keuangan tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efesiensi dalam pemanfaatan dana anggaran. Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan adanya efisensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan belum dimilikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran kegiatan.

Pada tahun anggaran 2018, Satpol PP Kabupaten Rembang memiliki total anggaran sebesar Rp.10.849.088.000,-. Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung sebesar Rp.6.147.762.000,- dan belanja langsung sebesar Rp.4.701.326.000,-. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdiri dari 8 program / 52 kegiatan. Anggaran yang terserap dari total anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.10.504.279.952,- atau sekitar 96,82 %.

Sedangkan pada tahun anggaran 2019, Satpol PP Kabupaten Rembang memiliki total anggaran sebesar Rp.12.056.105,393,-. Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung sebesar Rp.6.472.649.393,-dan belanja langsung sebesar Rp.5.583.456.000,-. Jumlah anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdiri dari 10 program / 50 kegiatan. Anggaran yang terserap dari total anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.11,402,319,685,- atau sekitar 94,58 %.

Secara garis besar capaian kinerja keuangan dan fisik merupakan sokongan untuk mencapai target indikator urusan dan indikator program Pencapaian indikator urusan merupakan satu hal yang penting mengingat peran Satpol PP dalam fungsi penunjang urusan wajib pelayanan dasar pada bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat .

## Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang

Satpol PP Kabupaten Rembang sebagaimana dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan wajib pelayanan dasar pada bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Satpol PP Kabupaten Rembang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Transmas gakda dan bidang Linmas dan Damkar;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Transmas gakda dan bidang Linmas dan Damkar;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Transmas gakda dan bidang Linmas dan Damkar;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satpol PP Kab. Rembang.

Satpol PP Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya berupaya untuk memastikan bidang Transmas gakda dan bidang Linmas dan Damkar dapat berjalan optimal, berkesinambungan dan sinergis. Upaya tersebut diwujudkan dalam kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Rembang dirumuskan dan dikaji berdasarkan format tabel T-C.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berikut tabel yang memuat target dan capaian kinerja untuk urusan wajib pelayanan dasar pada bidang ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat yang diampu oleh Satpol PP Kabupaten Rembang sebagaimana dalam Bab IX RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 s.d. 2021.

**Tabel 2.4.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang**

**Berdasarkan urusan**

**Tahun 2018-2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Aspek bidang/urusan/indikator** | **Satuan** | **Target Renstra Tahun** | **Capaian Tahun** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
|   | Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | org | 89 | 98,01 |  | 89 | 100 |  |
|   | Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah  | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |

Sumber : Satpol PP Kab. Rembang

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 dari 2 indikator urusan kinerja pelayanan Satpol PP sudah memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra hal ini dikarenakan perwujudan komitmen yang cukup baik Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2019 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.2

**Tabel 2.5**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang**

**Tahun 2018-2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Satuan** | **Target Renstra Tahun** | **Capaian Tahun** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sakip ( formulasi : Jumlah capaian Indikator Kinerja/Jumlah target Indikator Kinerja) | % | 70 | 85 |  | 97,25 | 85 |  |
| 2 | Prosentase ketercapaian pelayanan umum | % | 65 | 70 |  | 99,5 | 70 |  |
| 3 | Persentase Informasi yang disampaikan ke publik (jumlah informasi yang disampaikan publik : jumlah informasi publik yg wajib disampaikan) | % | 85 | 90 |  | 91,04 | 90 |  |
| 4 | Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Jumlah pelanggar Prokumda yang ditangani/ Jumlah pelanggaran Prokumda yang ada ) x 100 % | % | 82 | 85 |  | 95,26 | 100 |  |
| 5 | Persentase Kecamatan yang kondusif ( Jumlah Kecamatan yang kondusif / jumlah Kecamatan di Kab. Rembang x 100% ) | % | 82 | 83 |  | 98,65 | 100 |  |
| 6 | Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk (jumlah linmas x 10.000) / jumlah penduduk | % | 90 | 95 |  | 96,32 | 100 |  |
| 7 | prosentase layanan pemadaman, penylamatan, dan evakuasi korban dan berdampak kebakaran di kab. Rembang dalam tinggkat waktu tanggap (response tyme 15 menit / jmlh kejadian kebakaran di kab. Rembang x 100%) | % | 80 | 85 |  | 99,62 | 100 |  |

Sumber : Satpol PP Kab. Rembang

Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 dari 7 indikator kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang yang tercantum dalam Renstra perubahan Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, 7 indikator diantaranya dapat mencapai target yang ditetapkan di awal periode.

Pada prinsipnya kualitas Keamanan dan ketertiban masyarakat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain :

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam Kantibmas. Hal ini dapat terlihat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten pada kegiatan-kegiatan Satpol PP.
2. Meningkatnya konsistensi antara Aparat dengan Satpol PP;
3. Meningkatnya efektivitas produk-produk hukum yang berkaitan dengan K-3 dan lain-lain.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Satpol PP kabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas produk Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut :

* + - 1. Kualitas dan kapasitas SDM Satpol PP yang masih perlu ditingkatkan;
			2. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme Keamanan dan ketertiban masyarakat;
			3. Belum tersedianya prosedur standar operasional pelayanan terhadap kamtibmas pada masyarakat;
			4. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan OPD yang kurang pro aktif dengan Satpol PP menyebabkan kurang efektifnya proses penertiban dan keamanan dalam mengamankan Perda maupun Perkada;
			5. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam tugas Satpol PP.

## Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Rembang

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu urusan dengan dinamika yang terus menerus berkembang mengikuti pergerakan beberapa variabel seperti ekonomi, sosial, politik maupun perubahan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya dinamika tersebut, maka muncul isu-isu penting yang harus diakomodir maupun ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap Keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Rembang. Berikut uraian isu-isu penting sebagaimana dimaksud.

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

Tingkat kinerja Satpol PP Kabupaten Rembang dapat dilihat berdasarkan capaian indikator sasaran dan program sebagaimana pada tabel 2.3. secara umum kinerja Satpol PP tergolong baik dikarenakan mampu memenuhi target capaian indikator yang telah ditetapkan.

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satpol PP;

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas produk Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM Satpol PP yang masih perlu ditingkatkan;
2. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme Keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional pelayanan terhadap kamtibmas pada masyarakat;
4. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan OPD yang kurang pro aktif dengan Satpol PP menyebabkan kurang efektifnya proses penertiban dan keamanan dalam mengamankan Perda maupun Perkada;
5. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam tugas Satpol PP.
6. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional.

Dampak yang dapat muncul sebagai akibat dari permasalahan diatas diantaranya adalah sebagai berikut :

* 1. Rencana pembangunan Keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah disusun belum dapat direalisasikan sebagai akibat dari keterbatasan anggaran, sehingga akan berdampak pada capaian kinerja indikator maupun urusan dan program kegiatan;
	2. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan di lingkup Satpol PP Kabupaten Rembang, sehingga capaian program dan kegiatan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan;
	3. Kualitas dokumen pada Satpol PP yang kurang memadai dikarenakan rendahnya validitas data dan waktu penyusunan yang tidak ideal, sehingga *output* dari rencana yang dilaksanakan akan kurang sesuai dengan yang diharapkan;
1. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Satpol PP Kabupaten Rembang, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Rembang, antara lain :

* 1. Tantangan

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
3. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses Keamanan dan ketertiban masyarakat parsitipatif;
4. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kabupaten Rembang;
5. Adanya ketidak percayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses Pengamanan dan ketertiban, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.
	1. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam Keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan OPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders)
3. Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas dengan rasa aman.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Rekomendasai dan catatan strategis menilik dari permasalahan, tantangan dan peluang adalah sebagai berikut :

* 1. Perlunya rasa aman dan komprehensif dengan dukungan data yang valid dalam rangka menghadapi kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan serta dalam rangka memanfaatkan potensi Kabupaten Rembang secara optimal;
	2. Peningkatan fungsi kehumasan dalam bidang Keamanan dan ketertiban masyarakat melalui *city branding* untuk meningkatkan pamor Kabupaten Rembang, sehingga investasi dan pendapatan daerah dapat meningkat sekaligus dalam rangka mengurangi angka Kriminilitas di Kabupaten Rembang.

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Satpol PP Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2019. Selain itu review juga berisikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting. Pagu indikatif dalam Rancangan awal diisi berdasarkan berdasarkan matrik indikasi rencana program dan pendanaan Bab VIII RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.6.**

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Rembang Satuan Polisi Pamong Praja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rancangan awal RKPD** | **Hasil Analisis Kebutuhan** |
| **KODE** | **Program** | **Lokasi** | **Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **Target Capaian**  | **Pagu Indikatif APBD** | **Program** | **Lokasi** | **Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **Target Capaian**  | **Pagu Indikatif APBD** | **Catatan Penting** |
| **1.5.1** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |  |  |  | **11.075.078.000** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |  |  |  | **7.819.500.000** |  |
| **1** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |  |  |  | **11.075.078.000** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |  |  |  | **7.819.500.000** |  |
| **105** | **Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** |  |  |  | **11.075.078.000** | **Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** |  |  |  | **7.819.500.000** |  |
| **105.7** | **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **Kabupaten Rembang** | Persentase ketercapaian pelayanan umum | 90.00 % | **4.303.000.000** | **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **Kabupaten Rembang** | Persentase ketercapaian pelayanan umum | 90.00 % | **1.059.500.000** |  |
| **105.8** | **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kabupaten Rembang** | Persentase Keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 65.00 % | **56.500.000** | **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Kabupaten Rembang** | Persentase Keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 65.00 % | **0** |  |
| **105.9** | **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik** | **Kabupaten Rembang** | Persentase Informasi yang disampaikan ke publik (jumlah informasi yang disampaikan publik : jumlah informasi publik yg wajib disampaikan) | 100.00 % | **8.500.000** | **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik** | **Kabupaten Rembang** | Persentase Informasi yang disampaikan ke publik (jumlah informasi yang disampaikan publik : jumlah informasi publik yg wajib disampaikan) | 100.00 % | **0** |  |
| **105.71** | **Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas** | **Kabupaten Rembang** | Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Jumlah pelanggar Prokumda yang ditangani / Jumlah pelanggaran Prokumda yang ada ) x 100% | 80.00 % | **1.700.000.000** | **Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas** | **Kabupaten Rembang** | Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Jumlah pelanggar Prokumda yang ditangani / Jumlah pelanggaran Prokumda yang ada ) x 100% | 100.00 % | **1.915.000.000** |  |
|  |  |  | Persentase Kecamatan yang kondusif ( Jumlah Kecamatan yang kondusif / jumlah Kecamatan di Kab. Rembang x 100%) | 100.00 % |  |  |  | Persentase Kecamatan yang kondusif( Jumlah Kecamatan yang kondusif / jumlah Kecamatan di Kab. Rembang x 100%) | 100.00 % |  |  |
| **105.72** | **Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat**  | **Kabupaten Rembang** | Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk (jumlah linmas x 10.000 / jumlah penduduk) | 89.00 % | **5.007.078.000** | **Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat**  | **Kabupaten Rembang** | Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk (jumlah linmas x 10.000 / jumlah penduduk) | 89.00 % | **4.845.000.000** |  |
|  |  |  | Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan berdampak kebakaran di kab. Rembang dalam tinggkat waktu tanggap (response tyme 15 menit / jmlh kejadian kebakaran di Kab. Rembang x 100%) | 100.00 % |  |  |  | Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan berdampak kebakaran di kab. Rembang dalam tinggkat waktu tanggap (response tyme 15 menit / jmlh kejadian kebakaran di Kab. Rembang x 100%) | 100.00 % |  |  |
| **TOTAL PAGU INDIKATIF** | **11.075.078.000** |  |  |  |  | **7.819.500.000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***\*) Rumus presentasi ( % )***

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP KABUPATEN REMBANG**

1. **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

 Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”.**

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

1. **Masyarakat sejahtera**

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan, selain itu terjaga dan terlindunginya agama , harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Disisi lain dapat diwujudkan melalui sistem hukum, politik, sosial dan budaya.

1. **Semangat Kebersamaan**

Semangat adalah keadaan pikiran batin tergerak untuk melakukan suatu tindakan (kekuatan/dorongan dari dalam) (Kamus besar Bahasa Indonesia). Jadi semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Apabila kita memiliki semangat bagus maka sikap dan perilakunya biasanya terlihat dinamis.

Sedangkan kebersamaan adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional saja. Sehingga semangat kebersamaan disini mengandung semangat bersama dalam harmoni kerja membangun kabupaten rembang.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan, dengan membentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan, masyarakat yang demokratis dan beradap serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu maka diperlukan kebersamaan sikap kegotongroyongan (kerjasama), keterbukaan dan saling menghargai (toleransi) yang selalu ditumbuh kembangkan. Pembangunan itu mempunyai semangat pembangunan menuju Rembang yang “***madani***”. dalam Falsafah **Rembang Madani** menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan karakter baik dalam kerangka pendidikan formal maupun pendidikan nonformal (dalam keluarga)

1. **Pemberdayaan Masyarakat**

Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri. Membangun masyarakat bukan semata mata mengintroduksi dan mengimplementasikan permasalah ekonomi dan teknologi tetapi lebih pada persoalan harkat martabat manusia. Membangun masyarakat terkait dengan memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadi prioritas yaitu bentuk kontribusi riil untuk pelayanan dasar, aspirasi masyarakat yang terefleksi pada prioritas program pembangunan daerah, dan keterkaitan dalam perekonomian dan politik. Yang mana kesemuanya diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat terutama kaum miskin menjadi lebih baik.

1. **Kewirausahaan**

Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan suatu yang baru dengan cara kreatif dan atau penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memberikan nilai tambah. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya dan juga resiko. Disini diperlukan suatu keberanian dalam diri individu untuk melakukan tindakan membangun usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

Untuk menjawab pembangunan kewirausaahan adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, dinamis, serta memiliki integritas dan komitmen terhadap kemajuan. Pembnagunan kewirausahaan sebagai motor penggerak untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat lingkungannya, memajukan perekonomian daerah, memenuhi macam macam produk dan adanya jasa.

 Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu **“REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”**. Makna kata **SEJAHTERA** dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejateraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan beraklak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

 Berangkat dari pemahaman diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

* 1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
	2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
	3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
	4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
	5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
	6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
	7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

 Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Rembang tersebut, maka Satpol PP sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. **Penentuan Isu-isu Strategis**

 Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan Satpol PP karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kurang aman yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan rasa aman kepada masyarakat dalam jangka panjang.

 Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan keamanan dan keteriban maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Rembang dalam periode jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Satpol PP Kabupaten Rembang yaitu :

1. Belum optimalnya keterkaitan, konsistensi dan kesesuaian dalam keamanan dan keteriban di masyarakat;
2. Belum optimalnya implementasi hasil keterlitbangan masyarakat keamanan dan keteriban di masyarakat;

 Pembangunan di Kabupaten Rembang dalam RPJMD Kabupaten Rembang untuk tahun 2016-2021 telah dijelaskan bahwa tema tahunan pembangunan merupakan penekanan fokus perhatian berupa kebijakan/rencana/program pembangunan tiap tahunnya yang ditujukan untuk memberikan penekanan terhadap pencapaian visi dan misi dengan tetap memperhatikan keterpaduan pembangunan multisektor.

1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Rembang**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, SATPOL PP Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

1. **Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh SATPOL PP Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, adalah :

1. Meningkatkan rencana kegiatan dibidang administrasi kepegawaian, keuangan perlengkapan ( umum ), pengawasan, pengendalian serta merencanakan program Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatkan kualitas SDM untuk mewujudkan aparatur pemerintah dan masyarakat yang berkualitas melalui pelatihan bimbingan teknik.
3. Meningkatkan kedasaran masyarakat dalam mentaati peraturan dearah dan Peraturan kepala daerah
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan perda dan Peraturan kepala daerah melalui sosialisasi.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan good governance.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Rembang diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik melalui penelitian dan pengembangan yang selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

1. **Sasaran**

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Satpol PP Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappaeda dalam rangka pencapaian tujuan Satpol PP selama tahun 2016-2021, dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kegiatan bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan (umum), pengawasan, pengendalian serta merencanakan program OPD Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatnya aparatur pemerintah dearah dan masyarakat yang berkualitas melalui pelatihan bimbingan teknik.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda dan Peraturan Kepala Daerah melalui sosialisasi

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

**Pelayanan SATPOL PP Kabupaten Rembang**

**Tahun 2016-2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN/SASARAN** | **KINERJA TUJUAN/SASARAN** |
| **REALISASI** | **TARGET** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaopran pelaksanaan program dan kegiatan | Nilai SAKIP OPD | 55 | 65 | 85 | 97,42 | 90 | 95 |
|   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Meningkatknya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 |
|      | Meningkatkan rasa aman masyarakat | Meningkatnya kwalitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | Persentase Penurunan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat | 70 | 75 | 82 | 12 | 15 | 10 |
| Persentase kesiapsiagaan perlindungan Masyarakat | 70 | 85 | 90 | 89 | 100 | 100 |
| Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib dan tentram | Persentase Penanganan pelanggaran Perda | 78 | 80 | 82 | 80 | 80 | 100 |

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP adalah :

1. Partisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. partisipasi para pelaku pembangunan (*Stakeholders*) di dalam proses perencanaan sangat mempengaruhi arah kebijakan perencanaan yang dihasilkan. Semakin intensifnya peran pelaku pembangunan di dalam proses perencanaan, output perencanaan yang dihasilkan akan semakin menggambarkan kebutuhan riil masyarakat;

1. Sumber Daya Manusia.

 perencana yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum.

1. Data

kegiatan perencanaan harus berdasarkan data yang lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan perencanaan merupakan hal yang penting;

1. Dana

kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses perencanaan mulai dari penjaringan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumusan kebijakan;

1. Sarana

sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas perencanaan.

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan utamanya perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah**
2. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
6. **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9. **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik**
10. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
11. **Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas**
12. Penegakan Produk Hukum Daerah
13. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
14. **Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat**
15. Perlindungan Masyarakat
16. Penanggulangan Bahaya Kebakaran

 Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Rembang adalah sejumlah 5 program yang terdiri dari 11 kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 4.1.**

**Rencana Kerja dan Pendanaan Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)** | **Catatan Penting** | **Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021** | **Asal Usulan** |
| **Lokasi** | **Target Capaian**  | **Pagu Indikatif APBD** | **Pagu Indikatif APBD Prov** | **Pagu Indikatif APBN** | **Sumber Dana** | **Target Capaian**  | **Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.5.1** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |  |  |  | **11.075.078.000** | **0** | **0** |  |  |  | **7.819.500.000** |  |
| **1** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** |  |  |  | **11.075.078.000** | **0** | **0** |  |  |  | **7.819.500.000** |  |
| **105** | **Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat** |  |  |  | **11.075.078.000** | **0** | **0** |  |  |  | **7.819.500.000** |  |
| **105.7** | **Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | Persentase ketercapaian pelayanan umum | **Kabupaten Rembang** | 90.00 % | **4.303.000.000** | **0** | **0** |  |  | 90.00 % | **1.059.500.000** |  |
|  |  | Presentase Ketercakupan Sarana Prasarana Aparatur |  | 90.00 % |  |  |  |  |  | 90.00 % |  |  |
|  |  | Presentase Ketercapaian Pelayanan Kepegawaian |  | 90.00 % |  |  |  |  |  | 90.00 % |  |  |
|  |  | Presentase Ketercapaian Pelayanan Keuangan |  | 90.00 % |  |  |  |  |  | 90.00 % |  |  |
| 105.7.1 | **Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum** | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Kabupaten Rembang | 100.00 % | **378.000.000** | **0** | **0** |   |   | 100.00 % | **567.000.000** |  |
|  | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* |  |  | *100 %* | *3.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 4.500.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* |  |  | *100 %* | *110.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 165.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyediaan alat tulis kantor* |  |  | *100 %* | *25.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 37.500.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan* |  |  | *100 %* | *30.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 45.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan* |  |  | *100 %* | *5.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 7.500.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyediaan Makanan dan minuman* |  |  | *100 %* | *40.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 60.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah* |  |  | *100 %* | *125.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 187.500.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah* |  |  | *100 %* | *25.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 37.500.000 | *Usulan OPD* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | *Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga* |  |  | *100 %* | *15.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 22.500.000 | *Usulan OPD* |
| 105.7.2 | **Peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | Kabupaten Rembang | 100.00 % | **3.336.000.000** | **0** | **0** |   |   | 100.00 % | **492.500.000** |  |
|  | *Pengadaan Pakaian kerja lapangan* |  |  | *1 paket* | *195.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 292.500.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Pengadaan peralatan kantor* |  |  | *100 %* | *135.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor* |  |  | *250000000 rupiah* | *250.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional* |  |  | *100000000 rupiah* | *100.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor* |  |  | *100 %* | *25.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Pengadaan alat-alat komunikasi* |  |  | *1 paket* | *168.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Pembangunan Gedung Damkar* |  |  | *1 paket* | *2.000.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *penting* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor* |  |  | *100 %* | *46.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor* |  |  | *100 %* | *20.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyediaan peralatan rumah tangga* |  |  | *100 %* | *20.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja* |  |  | *100 %* | *25.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Penatausahaan BMD pada Pengguna Barang* |  |  | *100 %* | *10.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Pengadaan perlengkapan kantor* |  |  | *100 %* | *142.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Penataan Lingkungan Kantor Satpol PP* |  |  | *100 %* | *200.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 200.000.000 | *Usulan OPD* |
| 105.7.3 | **Peningkatan kualitas sumber daya aparatur** | Persentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | Kabupaten Rembang | 100.00 % | **326.000.000** | **0** | **0** |   |   | 100.00 % | **0** |  |
|  | *Diklat, Bintek Peningkatan Sumber Daya Manusia*  |  |  | *100 %* | *0* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyediaan Jasa administrasi Kantor/kebersihan* |  |  | *100 %* | *326.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
| 105.7.4 | **Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan** | presentase sarana dan prasarana aparatur kondisi baik | Kabupaten Rembang | 100.00 % | **263.000.000** | **0** | **0** |   |   | 100.00 % | **0** |  |
|  | *Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan* |  |  | *100 %* | *250.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | *Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun* |  |  | *100 %* | *13.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
| **105.8** | **Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Persentase Keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah | **Kabupaten Rembang** | 65.00 % | **56.500.000** | **0** | **0** |  |  | 65.00 % | **0** |  |
| 105.8.1 | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | Jumlah Indikator Kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan  | Kabupaten Rembang | 100.00 % | **28.000.000** | **0** | **0** |   |   | 100.00 % | **0** |  |
|  | *Penyusunan Renja* |  |  | *100 %* | *13.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyusunan Dokumen Anggaran* |  |  | *100 %* | *15.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
| 105.8.2 | **Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah** | Jumlah capaian indikator kinerja | Kabupaten Rembang | 100.00 % | **28.500.000** | **0** | **0** |   |   | 100.00 % | **0** |  |
|  | *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan* |  |  | *100 %* | *14.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyusunan LKJIP, LKPJ, LPPD* |  |  | *100 %* | *14.500.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
| **105.9** | **Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik** | Persentase Informasi yang disampaikan ke publik (jumlah informasi yang disampaikan publik : jumlah informasi publik yg wajib disampaikan) | **Kabupaten Rembang** | 100.00 % | **8.500.000** | **0** | **0** |  |  | 100.00 % | **0** |  |
| 105.9.1 | **Pengelolaan keterbukaan informasi publik** | Prosentase ketercapaian pelayanan umum | Kabupaten Rembang | 100.00 % | **8.500.000** | **0** | **0** |   |   | 100.00 % | **0** |  |
|  | *Pengelolaan Wab site* |  |  | *100 %* | *8.500.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
| **105.71** | **Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Pemeliharaan Kamtramtibmas** | Persentase Penegakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Jumlah pelanggar Prokumda yang ditangani / Jumlah pelanggaran Prokumda yang ada ) x 100% | **Kabupaten Rembang** | 80.00 % | **1.700.000.000** | **0** | **0** |  |  | 100.00 % | **1.915.000.000** |  |
|  |  | Persentase Kecamatan yang kondusif( Jumlah Kecamatan yang kondusif / jumlah Kecamatan di Kab. Rembang x 100%) |  | 100.00 % |  |  |  |  |  | 100.00 % |  |  |
| 105.71.1 | **Penegakan Produk Hukum Daerah** | Jumlah operasi Gakda di wilayah Kabupaten Rembang,  | Kabupaten Rembang | 100.00 % | **735.720.000** | **0** | **0** |   |   | 100.00 % | **775.000.000** |  |
|  | *Penegakan PERDA dan PERKADA* |  |  | *6 Peraturan* | *222.037.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 250.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Pembinaan dan pengawasan pelanggar PERDA dan PERKADA* |  |  | *10 kali* | *74.045.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 75.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidik PPNS* |  |  | *4 kali* | *167.605.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 170.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Pemberantasan Barang kena Cukai ilegal* |  |  | *96 kali* | *200.000.000* | *0* | *0* | Dana Bagi Hasil | *usulan OPD* |  | 200.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Pengawalan Pejabat dan orang-orang penting* |  |  | *83 kali* | *72.033.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 80.000.000 | *Usulan OPD* |
| 105.71.2 | **Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** | Jumlah Kelompok Sasaran Tibum yang terbina | Kabupaten Rembang | 100.00 % | **964.280.000** | **0** | **0** |   |   | 100.00 % | **1.140.000.000** |  |
|  | *Patroli Kamtimas* |  |  | *102 kali* | *183.148.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 200.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Kodal Trantib* |  |  | *0*  | *0* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Penyelenggaraan PAM Obvit dan aset-aset penting daerah* |  |  | *60 kali* | *569.270.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 700.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat trantib Kecamatan* |  |  | *4 kali* | *50.353.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 60.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan KST* |  |  | *55 org* | *19.308.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 30.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Fasilitasi Penyelenggaraan gelar pasukan Tingkat Propinsi dan Jambore Satpol PP dan HUT TK.Kab.* |  |  | *1 kali* | *142.201.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 150.000.000 | *Usulan OPD* |
| **105.72** | **Program Kesiagaan, Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat**  | Rasio Linmas per Jumlah 10.000 penduduk (jumlah linmas x 10.000 / jumlah penduduk) | **Kabupaten Rembang** | 89.00 % | **5.007.078.000** | **0** | **0** |  |  | 89.00 % | **4.845.000.000** |  |
|  |  | Persentase layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan berdampak kebakaran di kab. Rembang dalam tinggkat waktu tanggap (response tyme 15 menit / jmlh kejadian kebakaran di Kab. Rembang x 100%) |  | 100.00 % |  |  |  |  |  | 100.00 % |  |  |
| 105.72.1 | **Perlindungan Masyarakat** | Jumlah Linmas Terlatih | Kabupaten Rembang | 100.00 % | **1.035.000.000** | **0** | **0** |   |   | 100.00 % | **645.000.000** |  |
|  | *Pengiriman Anggota Linmas ke Diklat Provinsi dan Jambore Linmas* |  |  | *20 Kali* | *95.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 95.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Pembinaan Anggota Linmas* |  |  | *10 Kali* | *200.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 250.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Pengerahan Anggota linmas dalam HUT Linmas* |  |  | *1 Kali* | *40.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 50.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Fasilitasi Linmas dalam Pengamanan Pilkada* |  |  | *1 Kali* | *500.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 0 | *Usulan OPD* |
|  | *Fasilitasi Linmas Inti Kabupaten* |  |  | *25 Orang* | *200.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 250.000.000 | *Usulan OPD* |
| 105.72.2 | **Penanggulangan Bahaya Kebakaran** | Jumlah Kasus Kebakaran yang tertangani | Kabupaten Rembang | 100.00 % | **3.972.078.000** | **0** | **0** |   |   | 100.00 % | **4.200.000.000** |  |
|  | *Pemeliharaan sarana dan prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran* |  |  | *8 Sarpras* | *136.140.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 200.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Operasional Penanggulangan Bahaya Kebakaran* |  |  | *1 Paket* | *835.938.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 1.000.000.000 | *Usulan OPD* |
|  | *Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran* |  |  | *100 %* | *3.000.000.000* | *0* | *0* | Dana Alokasi Umum (D A U) | *usulan OPD* |  | 3.000.000.000 | *Usulan OPD* |
| **TOTAL PAGU INDIKATIF** |  |  | **11.075.078.000** | **0** | **0** |  |  |  | **7.819.500.000** |  |

**BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah dalam RPJMD Tahun 2016-2021 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021. Beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah bahwa dalam penyusunan program/kegiatan untuk Tahun Anggaran 2021 hendaknya pula mencermati keselarasan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang, menggali potensi serta sebagai upaya untuk memenuhi capaian indikator yang telah ditetapkan.

Kaidah dalam penyusunan serta pelaksanaan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Rembang diharuskan untuk mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku, khususnya dalam segi perencanaan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah yang tentunya akan memerlukan penyesuaian dari aturan terdahulu.

Dengan disusunnya Renja Satpol PP Kabupaten Rembang yang juga merupakan bahan penelaahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2021, maka rencana tindak lanjut kedepan sesuai dengan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dengan digunakannya Renja sebagai acuan dalam perencanaan perangkat daerah.

Rembang, Januari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN REMBANG



**Drs. H. WALUYO, MM**

Pembina Utama muda

NIP.19630401 199102 1 001